

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan pada bab terdahulu, dimulai dari pendahuluan, kerangka teoritis, metode penelitian, temuan data dan analisis data, serta uji hipotesis, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

7.1 Kesimpulan

Politik uang pada umumnya diartikan sebagai pendistribusian uang atau barang kepada pemilih dari calon kandidat agar pemilih memberikan suara kepada calon yang bersangkutan melalui uang atau barang tersebut. Politik uang tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga dalam bentuk benda kelompok ataupun barang pribadi. Penelitian ini berguna untuk mengetahui hubungan politik uang dengan status sosial ekonomi masyarakat pada pemilu legislatif Kota Padang.

Berdasarkan hasil analisis data dari uji hipotesis penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya hubungan antara variabel (X) yakni politik uang dengan variabel (Y) status sosial ekonomi. Hal ini terlihat dari uji hipotesis penelitian dengan menggunakan korelasi *Kendall Tau* dimana diperoleh harga koefisien korelasi sebesar 0,428 dengan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,007, dengan demikian dapat diambil keputusan bahwasannya Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis alternatif (H_a) diterima. Selanjutnya untuk korelasi koefisiensi memiliki pengertian kekuatan pengaruh yang diberikan oleh satu variabel ke variabel lainnya. Dapat dilihat bahwasannya nilai koefisien korelasi sebesar 0.428, yang artinya terdapat hubungan positif yang terjadi antara politik uang dengan status

sosial ekonomi yang menunjukkan bahwa perbedaan tingkat status sosial ekonomi jika status sosial ekonomi kategori rendah akan tinggi politik uang yang terjadi, begitu sebaliknya jika tingkat status sosial ekonomi kategori tinggi maka rendah kaitannya dengan politik uang yang terjadi dalam pemilu

7.2 Saran

Berdasarkan pemaparan di atas maka saran yang sekiranya bisa memberikan masukan ke depan yaitu perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan politik uang dengan status sosial ekonomi masyarakat Kota Padang, tidak hanya pada pemilu legislatif saja melainkan pada pemilihan umum kepala daerah maupun presiden dan wakil presiden. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut menggunakan variabel lainnya agar menjawab dan menjelaskan secara komprehensif hubungan politik uang dengan status sosial ekonomi masyarakat Kota Padang pada Pemilu Legislatif dengan waktu yang berbeda dan variabel yang berbeda juga.

Perlu dilakukan komparasi dengan menggunakan penelitian lain untuk menelaah praktik politik uang yang terjadi dalam masyarakat. Diharapkan kepada lembaga penyelenggara pemilu (KPU) dan badan pengawas pemilu (Bawaslu) untuk memsosialisasikan mengenai politik uang, karena kebanyakan masyarakat kurang mengetahui apa penyebab terjadinya politik uang di kalangan masyarakat serta politik uang hanya berbentuk pemberian uang tunai saja, padahal ada variasi lain dari politik uang tersebut.